



Pendidikan Eksekutif tentang PRB untuk Indonesia

 SESI : Pertimbangan Kebijakan dan Peraturan

 Rita Helbra Tenrini, Sumati Rajput

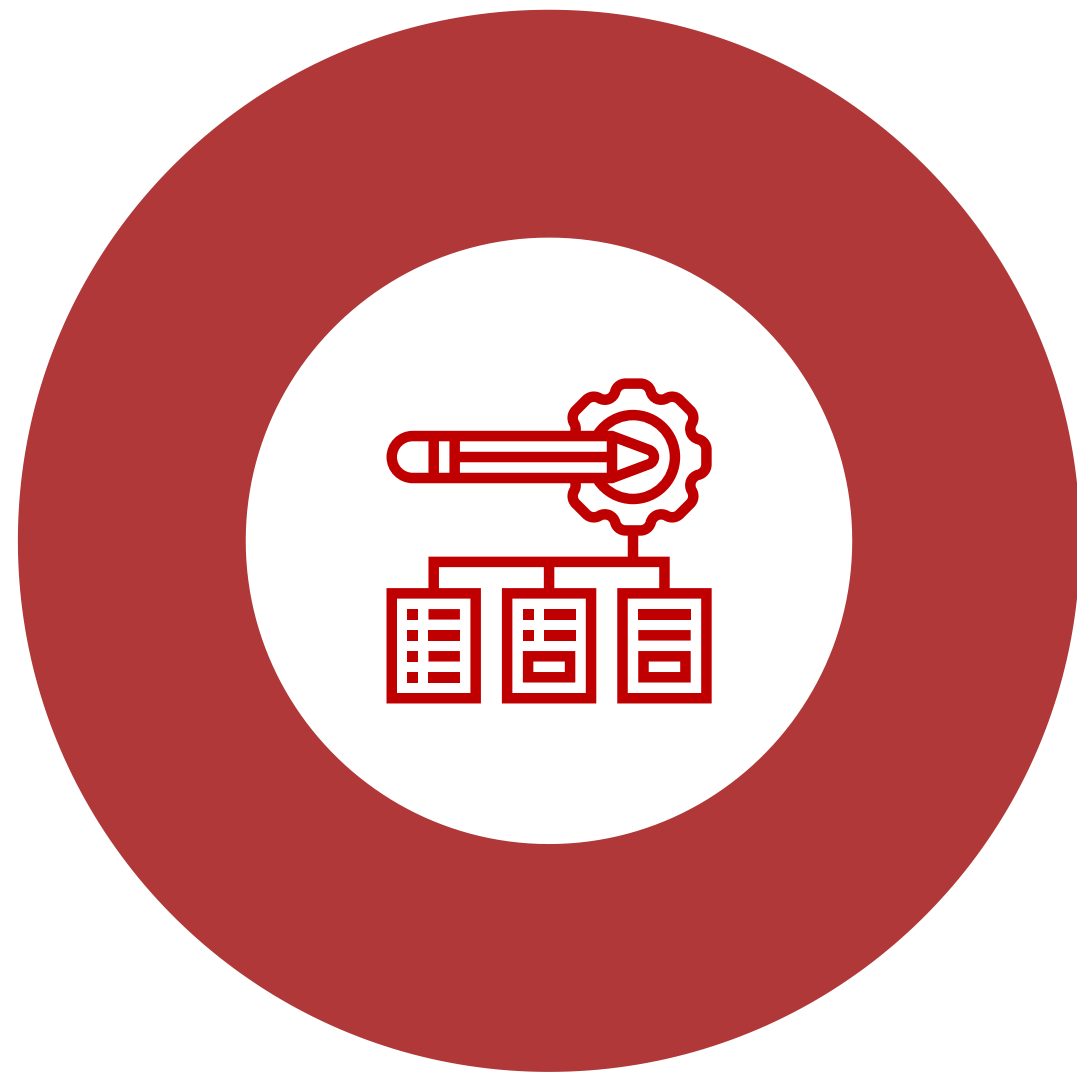


Disaster Risk Financing
& Insurance Program



Global Shield
Financing Facility

Tujuan Pembelajaran Utama



Mengapa kerangka kerja kebijakan, peraturan, dan kelembagaan yang efektif dan mendukung diperlukan



Apa saja pertimbangan yang diperlukan untuk kerangka kerja kebijakan, peraturan, dan kelembagaan yang mendukung



Bagaimana negara mengembangkan kebijakan dan peraturan untuk PRB

Mengapa Diperlukan Kebijakan dan Kerangka Regulasi yang Efektif dan Memungkinkan



Panduan dan prinsip-prinsip

Menetapkan tujuan organisasi dan memberikan panduan tentang cara mencapai tujuan



Kejelasan

Membantu semua pemangku kepentingan mencapai pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan dan cara mengimplementasikannya



Konsistensi

Memastikan bahwa proses implementasi tidak menyimpang atau memburuk dari waktu ke waktu



Efisiensi

Meningkatkan implementasi dan kinerja program dengan menjaga semua pemangku kepentingan "berada di jalur yang sama" melalui pemahaman yang sama

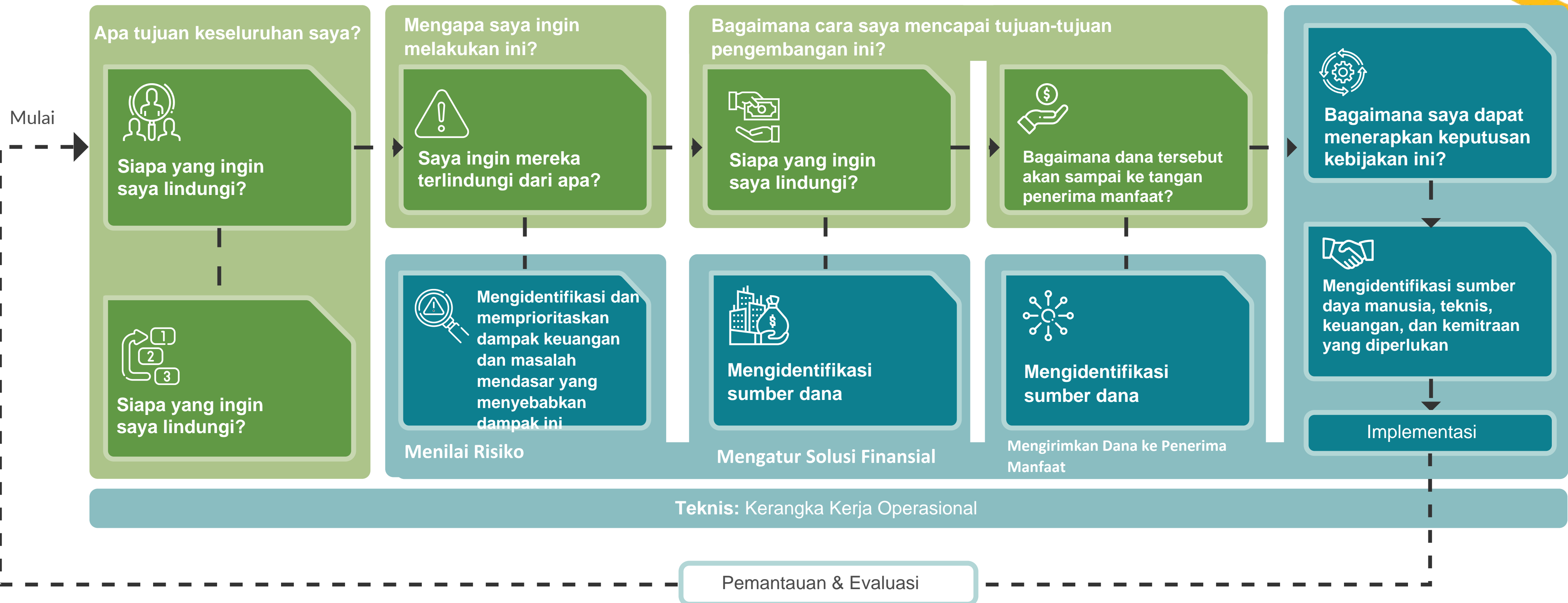


Akuntabilitas

Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas

Kerangka Kerja Kebijakan untuk Pendekatan PRB

Menetapkan Kebijakan untuk PRB [Hijau: Area kebijakan; Biru: Implementasi]



Mengidentifikasi pengorbanan

Pertukaran yang biasa terjadi

Otonomi yang berdaulat



'Kontrol' donor

Hak milik



Akses terbuka

Harga pasar



Sumber daya anggaran yang terbatas

Tanggung jawab fiskal



Sumber daya yang langka

Bantuan



Tanggung jawab fiskal

Bantuan



Pengembangan

Tanggapan regional



Otonomi yang berdaulat

Perhatian politik jangka pendek



Stabilitas politik jangka panjang



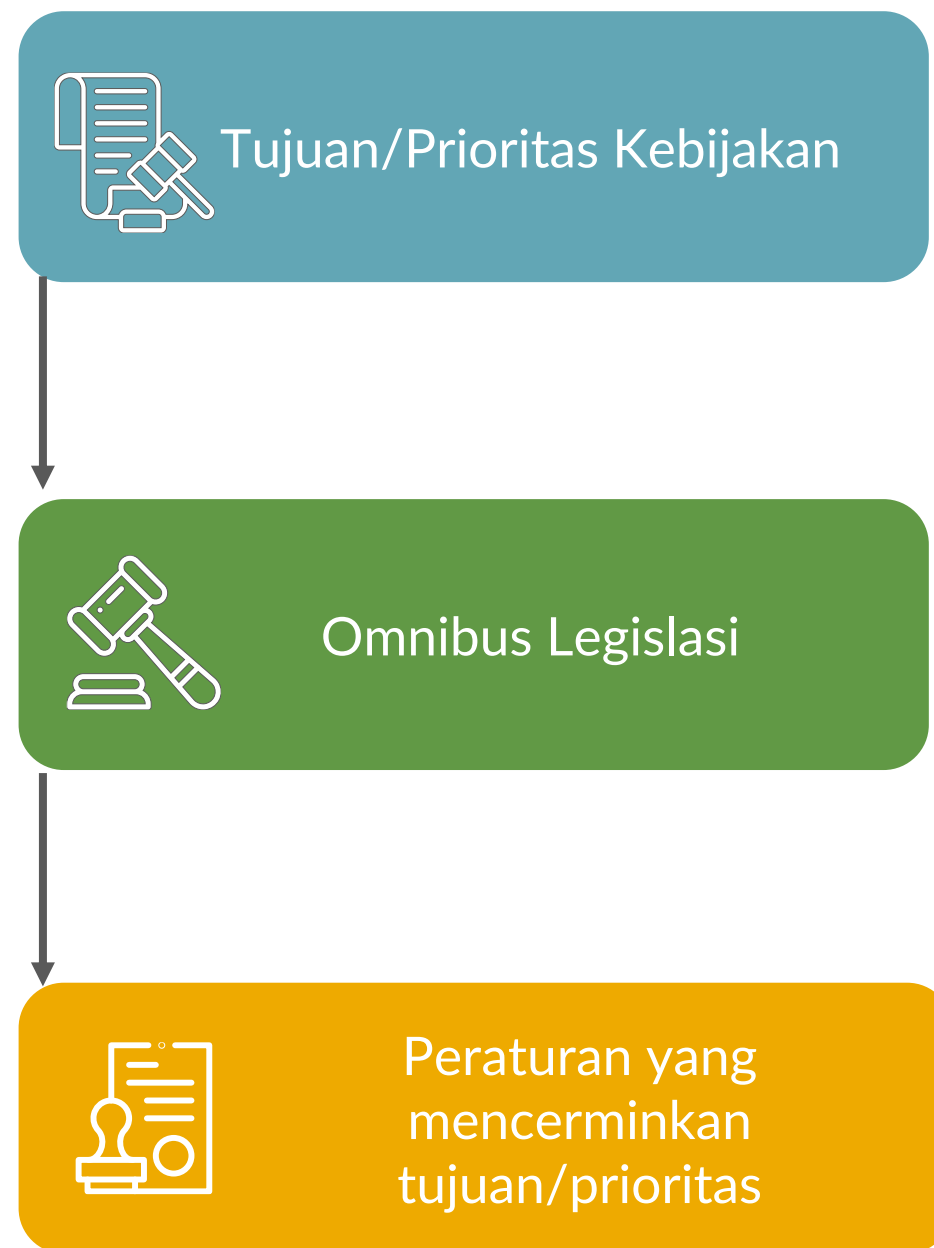
Apa yang termasuk dalam kebijakan PRB

Kebijakan PRB	Aspek	Deskripsi
	 Mandat	Otorisasi menurut undang-undang untuk melakukan strategi dan tindakan masing-masing
	 Penerima manfaat	Identifikasi dan penentuan prioritas penerima manfaat
	 Cakupan aset	Aset apa saja yang akan dilindungi dalam Program ini
	 Cakupan bahaya	Bahaya mana (misalnya, bencana alam) yang akan berlaku
	 Alokasi peran & tanggung jawab	Identifikasi entitas mana yang akan bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengadministrasikan program perlindungan keuangan aset publik
	 Pengaturan tata kelola	Bagaimana Program akan dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu
	 Pengaturan pendanaan	Bagaimana implementasi akan didanai, dan bagaimana biaya operasional/premi akan dialokasikan
	 Ruang lingkup & kewajiban partisipasi	Entitas mana yang dapat berpartisipasi, dan apakah partisipasi bersifat wajib atau sukarela
	 Ruang lingkup instrumen PRB	Instrumen PRB mana yang akan/dapat digunakan

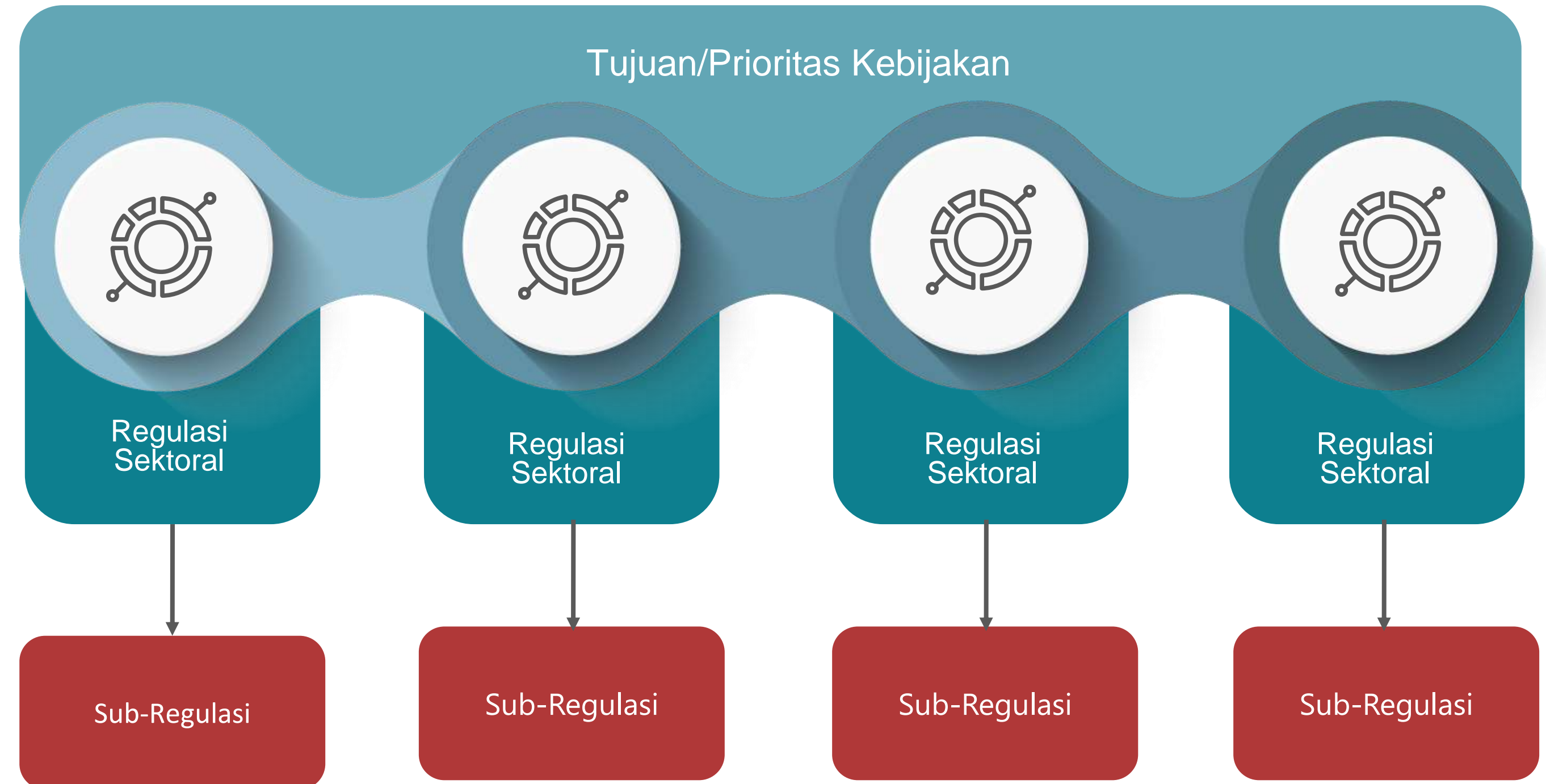
Kerangka Regulasi dan Kelembagaan untuk PRB - Pendekatan

Regulasi dan pengaturan kelembagaan yang efektif berasal dari tujuan/prioritas kebijakan untuk program perlindungan keuangan dan berfungsi sebagai jembatan antara tujuan kebijakan dan implementasi

Pendekatan Omnibus



Pendekatan Sektoral



Pertimbangan Lain

Proses penyusunan legislasi/peraturan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:



Pertanyaan untuk Diskusi

1. Apakah negara Anda telah memulai pengembangan kebijakan dan kerangka kerja peraturan untuk pembiayaan risiko bencana? Di mana posisi negara saat ini?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Anda selama proses pembangunan tersebut? Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
3. Ketika Anda kembali ke negara asal Anda, apa yang akan Anda sarankan kepada manajemen senior Anda untuk meningkatkan kerangka kerja kebijakan dan peraturan untuk perlindungan keuangan yang lebih baik terhadap bencana?

